

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan manusia terus terjadi selama hidupnya, dan sebagai makhluk yang berakal, manusia belajar dari keluarga di rumah bahkan masyarakat di sekitarnya. Di zaman modern seperti saat ini, belajar tidak cukup didapat hanya dari keluarga, melainkan harus ditambahkan dari lembaga pendidikan yang profesional dibidangnya.

Pendidikan adalah cara untuk mengoptimalkan kemampuan, potensi dan bakat dalam diri seseorang. Pendidikan juga jalan untuk mencapai cita-cita yang diimpikan dari sejak kecil, diharapkan dengan pendidikan cita-cita tersebut akan tercapai saat dia dewasa. Dengan pendidikan pula kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dapat diraih sebagai balasan dari usahanya dalam menempuh pendidikan. Pendidikan sejatinya adalah upaya untuk memanusiakan manusia, agar dapat hidup seperti layaknya manusia yang berakal dan bermartabat.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas nyata arah dan tujuan pendidikan yakni; untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga bagian dari Hak Asasi (HAM) yang termaktub pada UUD 1945 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.”

Berlandaskan dari UUD 1945 sebagai peraturan hukum positif yang tertinggi dan sebagai dasar negara tersebut maka seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik

Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Persamaan hak ini tidak memandang suku, ras maupun agama, selama dia berkewarganegaraan dan berdomisili di dalam lingkup NKRI dia tetap mendapatkan haknya. Ini juga sebuah jaminan dari negara untuk warganegaranya dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan.

Keaadan saat ini, jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak jumlahnya tetapi belum tentu diimbangi dengan pembangunan sekolah. Persebaran sekolah yang tidak merata membuat penduduk harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke sekolah. Hal ini tentu dapat mengurangi minat penduduk dalam hal belajar di sekolah. Kebutuhan penduduk akan sekolah seharusnya dipenuhi oleh pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan. Dengan melihat jumlah penduduk maka pemerintah tahu jumlah sekolah yang dibutuhkan.

Kota Tanjungbalai adalah salah satu kota di kawasan pesisir pantai timur Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 6.052,9 Ha dengan penduduknya berjumlah 158.599 jiwa dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK sebesar 56,82 % (Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2014). Saat ini di Kota Tanjungbalai sudah berdiri 26 sekolah menengah baik negeri maupun swasta. Sekolah tingkat menengah atas (SMA) terdiri dari 7 sekolah negeri dan 4 sekolah swasta, tingkat madrasah aliyah (MA) terdiri dari 1 sekolah negeri dan 6 sekolah swasta, dan sekolah tingkat menengah kejuruan (SMK) terdiri dari 6 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta (Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2014).

Data Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama pada tahun ajaran 2014/2015 jumlah siswa yang sedang bersekolah pada tingkat sekolah menengah adalah 9.766 siswa. Dengan rincian siswa pada SMA dan SMK Negeri maupun Swasta tercatat sebanyak 8.421 siswa, dan siswa pada MA negeri maupun swasta

sebanyak 1.345 siswa, serta siswa yang berasal dari luar daerah Kota Tanjungbalai adalah 1.358 siswa

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, lokasi sekolah ini berhubungan dengan pembangunan sekolah yang tidak merata di Kota Tanjungbalai pembangunan sekolah cenderung tidak merata, hal ini terlihat pada 8 dari 25 sekolah menengah berada pada Kecamatan Tanjungbalai Selatan yaitu sekolah SMA Negeri 1 Tanjungbalai, SMA Swasta Daar Al-Falah, MA Swasta Daar Al-Falah, SMK Swasta Daar Al-Falah, SMA Swasta Metodis 2, SMA Swasta Sisingamangaraja, SMA Swasta Tri Tunggal, dan MA Negeri Tanjungbalai, kecamatan ini penduduknya berjumlah 19.851 jiwa. Kondisi ini berbanding terbalik Kecamatan Datuk Bandar Timur yang hanya memiliki 2 sekolah menengah yaitu sekolah SMAN 6 Tanjungbalai dan SMKN 4 Tanjungbalai, kecamatan ini penduduknya berjumlah 27.666 jiwa, kondisi ini berlawanan dengan Permendiknas No. 24 tahun 2007 yang menyatakan satu SMA/MA melayani maksimum 6000 jiwa penduduk.. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan belum tercukupi contohnya SMA Negeri 3 Tanjungbalai yang hanya memiliki 24 ruang kelas, sedangkan mereka memiliki siswanya berjumlah 878 siswa yang membutuhkan kelas lebih dari itu berdasarkan Permendiknas No. 24 tahun 2007 dan Permendiknas No. 40 tahun 2008 menetapkan standar kapasitas maksimum dalam satu ruang kelas adalah 32 peserta didik, mengakibatkan pihak sekolah terpaksa memaksakan jumlah siswa di ruang kelas melebihi kapasitas maksimum. Penyebab putus sekolah antara lain, nilai di ijazah yang rendah dan lokasi sekolah yang jauh dari permukiman. Nilai di ijazah yang rendah mengakibatkan siswa yang berasal dari dalam daerah Kota Tanjungbalai tersebut tidak diterima di sekolah-sekolah menengah di Kota Tanjungbalai, sehingga siswa dari luar daerah kota ini yang memiliki nilai lebih tinggi dapat diterima di

sekolah-sekolah menengah di kota ini. Kurangnya ruang kelas yang menyebabkan siswa tidak belajar optimal, bahkan minat belajarpun berkuang. Bagi keluarga yang berpenghasilan rendah sekolah tidak begitu penting, sehingga terjadi persepsi yang salah di kalangan masyarakat. Adanya oknum dari sarana perdagangan seperti pasar kota, toko, kios maupun tangkahan boat yang mempekerjakan anak usia sekolah. Kurangnya minat siswa dalam belajar diakibatkan sarana dan prasarana pendidikan. Aksesibilitas yang buruk menuju sekolah yaitu jalan yang sangat sulit dilalui menuju SMK Negeri 4, SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 6.

Hasil penelitian pendahuluan ini membuktikan bahwa persebaran sekolah menengah tidak merata dan ketersediaan sekolah menengah masih kurang. Kondisi ini mengundang penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang persebaran dan ketersediaan sekolah menengah (SMA/MA dan SMK) di Kota Tanjungbalai.

Ketersediaan sekolah haruslah dalam ketersediaan yang baik dalam hal kesiapan sekolah untuk digunakan pada waktu saat ini dan ketersediaan tersebut memenuhi standar nasional menurut peraturan yang ada dalam hal penggunaannya. Peraturan yang mengatur sarana dan prasarana pendidikan untuk SMA/MA terdapat di dalam Permendiknas No. 24 tahun 2007 serta untuk SMK/MAK terdapat di dalam Permendiknas No. 40 tahun 2008. Pada peraturan tersebut tertulis kriteria minimum yang harus dicapai dan dilampaui oleh sekolah yang menggunakannya. Kemudian dari sarana dan prasarana pendidikan yang ada seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat

berkreasi, dan perlengkapan lain serta ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ruang kelas adalah prasarana yang paling berpengaruh dalam proses pembelajaran siswa. Sebab di ruang belajarlah tempat kegiatan pembelajaran dilaksanakan, dan sebagai fungsi utamanya sebagai ruang tempat siswa menerima pelajaran melalui proses interaktif antara siswa dengan sistem kelas berpindah (moving class) maupun kelas tetap. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dikaji persebaran dan ketersediaan sekolah menengah di Kota Tanjungbalai tahun 2014.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Ketersediaan sekolah menengah yang belum sesuai Permendiknas, (2) Persebaran sekolah menengah yang tidak merata, (3) Ketidaksesuaian sekolah menengah dengan kebutuhan penduduk usia sekolah, (4) Kurangnya ruang kelas dengan angka partisipasi siswa, (5) Kurangnya minat siswa dalam belajar karena kurangnya ruang kelas, (6) Persepsi yang salah menganggap kerja lebih baik dari belajar, (7) Aksesibilitas yang buruk menuju lokasi sekolah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dibatasi mengenai persebaran sekolah menengah di Kota Tanjungbalai, dan ketersediaan sekolah menengah tersebut dengan Permendiknas No. 24 tahun 2007 untuk SMA/MA dan Permendiknas No. 40 tahun 2008 untuk SMK.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persebaran sekolah menengah di Kota Tanjungbalai tahun 2014 (berdasarkan luas kota, luas kecamatan dan jenis sekolah)?
2. Bagaimana ketersediaan sekolah menengah di Kota Tanjungbalai tahun 2014 (berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk usia 16-18 tahun, dan jumlah siswa yang bersekolah menengah)?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Persebaran sekolah menengah di Kota Tanjungbalai tahun 2014 (berdasarkan luas kota, luas kecamatan dan jenis sekolah).
2. Ketersediaan sekolah menengah di Kota Tanjungbalai tahun 2014 (berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk usia 16-18 tahun, dan jumlah siswa yang bersekolah menengah).

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan informasi dan saran kepada pemerintah daerah Kota Tanjungbalai dalam mengambil kebijakan untuk membuat program pembangunan di sektor sekolah menengah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Universitas Negeri Medan khususnya Jurusan Pendidikan Geografi sebagai penambah pengetahuan dalam bidang persebaran dan ketersediaan sekolah.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana pendidikan.

4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan sejenis atau yang memiliki topik relevan dengan tema penelitian ini.



THE
Character Building
UNIVERSITY